

Egaliter Semu Jela

SEBANYAK 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di sepanjang tahun 2005. Menjelang pilkada, muncul fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Di antaranya adalah maraknya perilaku egalitarian di kalangan elite politik lokal. Ada apa dengan mereka?

Dalam wacana akademik, egalitarian dikonotasikan dengan paham yang meyakini bahwa semua orang berkedudukan sederajat, dan bahwa persamaan hak serta perlakuan yang berkeadilan terhadap semua orang ditempatkan sebagai norma agung yang dijunjung (Kuper, 1985).

Dalam penyelenggaraan hidup bernegara dan bermasyarakat, konsep ini amat populer, terutama di negara-negara yang menganggap penting peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bersama (*welfare state*), sebab salah satu prinsip penting egalitarian adalah bahwa semua orang, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama atas kesejahteraan hidupnya (Hogwood & Gunn, 1984).

Seseorang yang cenderung berperilaku egalitarian, karenanya, lalu disebut egaliter. Perilaku demikian diirikan oleh sikap yang menghargai pendapat dan kepentingan orang lain, rendah hati, penuh perhatian, memiliki kemauan untuk membagi (*sharing*) dengan sesama, dan sebagainya.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemimpin berparadigma egaliter biasanya tampil sebagai sosok populer, lantaran sejumlah kebijakan yang diambil hampir pasti merupakan kebijakan populis, yang berbasis kepentingan publik, berorientasi menjawab kebutuhan rakyat banyak, untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Wujud Egaliter

Ketika agenda pilkada dimulai, kegiatan rekrutmen calon kepala daerah (cakada) pun menjadi 'menu pembuka' yang segera menghangatkan suasana 'pesta'. Pada saat yang sama, egaliter menjadi kecenderungan perilaku elite politik, terutama elite politik lokal yang akan tampil menjadi cakada di bursa pilkada.

Manifestasinya dapat dirasakan dengan nyata pada peregrasan perilaku mereka yang semula angkuh menjadi penuh perhatian, semula sombong kini

tan kepala daerah (kada), menjadi kata kunci yang menyempurnakan pesona egaliternya.

Lihat saja, sejumlah bupati/wali kota yang kini sedang menjabat dan memutuskan untuk menjadi cakada pada pilkada mendatang; perilakunya sungguh tak bagai biasanya. Ada seorang bupati, yang biasanya rajin datang bila ada undangan rapat di kantor gubernur atau di istana negara; mendadak kini ia lebih suka mendatangi undangan rapat di kantor kecamatan, kelurahan, kantor desa, atau di balai RW, bahkan mungkin di rumah ketua RT. Mengapa demikian? Karena perhelatan rapat di tingkat akar rumput identik dengan penggalangan simpati massa, yang itu sangat menguntungkan bagi keperluan mendulang suara.

Kasus lain, ada wali kota yang kini lebih gemar menjadi pembicara seminar ketimbang melaksanakan 'tugas' dinas ke luar kota, atau ke luar negeri sekalipun. Pasalnya, di setiap acara seminar yang digelar, ia memiliki kesempatan untuk membangun simpati publik, terlebih bila seminar tersebut diekspose secara besar-besaran oleh media massa setempat (lihat JP, 6/3/2003).

Penggunaan media massa sebagai alat promosi oleh para cakada, tak kalah canggihnya dengan desain iklan barang dagangan. Modus ini terutama mampu dilakukan oleh cakada yang sedang *jumeneng noto* menjadi bupati/wali kota sekarang. Ada yang dilakukan dengan menampilkan sejumlah program kerja berikut prestasinya, atau bahkan dengan sengaja di sebuah kolom di sudut koran, potret, dan senyumnya dipampang, dia datang menyapa warganya. Lalu dengan bahasa sejuk, lembut, dan persuasif; komunikasi politik yang berusaha menyentuh 'medan hati' warganya pun ia tuangkan dalam kata penuh makna (lihat Kompas Jatim, 9/3/2005).

Egaliter ala Sinterclas, dengan jalan membagi-bagikan apa saja



Oleh

DR. ENY HARYATI, M.SI

Dosen FIA-Unitomo, Staf Ahli Clients, Direktur Eksekutif Center for Integrated Community Learning and Empowerment (CICLE)

nerima, sekaligus berfungsi sebagai alat komunikasi yang memperlancar koordinasi, setidaknya koordinasi politik di sepanjang pilkada berlangsung.

Bermunculannya sejumlah 'Sinterclas' yang datang dengan aneka hadiah dan bawaan, bertujuan menghamba pada nyonya dan tuan, bukan hal aneh yang dihadapi para pemimpin informal (orang berpengaruh yang mampu menggaglang massa) di hampir seluruh

*Egaliter menjad
perilaku elite poli
politik lokal yang a
cakada di bu*

pelosok desa. Tentu saja itu dilakukan dengan amat rapi, lantaran takut 'semprit polisi' pengawas pilkada berbunyi, dan insiden 'tilang' pun terjadi.

Masih banyak lagi modus egaliter lain yang mengemuka akhir-akhir ini, termasuk segudang janji manis tentang apa yang akan dilakukan dan diberikan, bila cakada berhasil memenangkan persaingan dalam

Egaliter Semu Jelang Pilkada

Sebanyak 16 Kabupaten/kota di Jawa Timur, akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di tahun 2005. Menjelang pilkada, muncul fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Diantaranya adalah maraknya perilaku egalitarian di kalangan elite politik lokal. Ada apa dengan mereka?

Dalam wacana akademik, egalitarian dikonotasikan dengan paham yang meyakini bahwa semua orang berkedudukan sederajat, dan bahwa persamaan hak serta perlakuan yang berkeadilan terhadap semua orang ditempatkan sebagai norma agung yang dijunjung (1985).

Dalam penyelenggaraan hidup bernegara dan bermasyarakat, konsep ini sangat populer, terutama di Negara-negara yang menganggap pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bersama (welfare state), sebab salah satu prinsip penting egalitarian adalah bahwa semua orang tanpa kecuali, memiliki hak yang sama atas kesejahteraan hidupnya (Hogwood & Gunn, 1984).

Seseorang yang cenderung berperilaku egalitarian, karenanya, lalu disebut egaliter. Perilaku demikian dicirikan oleh sikap yang : menghargai pendapat dan kepentingan orang lain, rendah hati, penuh perhatian, memiliki kemampuan untuk membagi (sharing) dengan sesama, dan sebagainya.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemimpin berparadigma egaliter biasanya tampil sebagai sosok populer, lantaran sejumlah kebijakan yang diambil hampir pasti merupakan populis, yang berbasis kepentingan publik, berorientasi menjawab kebutuhan rakyat banyak, untuk mencapai kesejahteraan bersama

Wujud egaliter

Ketika agenda pilkada dimulai, kegiatan rekrutmen calon kepala daerah (cakada) pun menjadi 'menu pembuka' yang segera menghantarkan suasana 'pesta'. Pada saat yang sama, egaliter menjadi kecenderungan perilaku elite politik, terutama elite politik lokal yang akan tampil menjadi cakada di bursa pilkada.

Manifestasinya dapat dirasakan dengan nyata pada pergeseran perilaku mereka yang : semula angkuh menjadi penuh perhatian, semula sombong kini menjadi rendah hati, dari sikap kaku menjadi luwes, dari yang berorientasi ke 'atas' menjadi berorientasi ke 'bawah', dari arogan menjadi santun, dari kikir menjadi pemurah, dari acuh tak acuh menjadi ramah, dan sebagainya. Pada konteks ini, janji untuk berkinerja terbaik jika nanti berhasil memangku jabatan kepala daerah (Kada), menjadi kata kunci yang menyempurnakan persona egaliternya.

Lihat saja, sejumlah bupati,/wali kota yg kini sedang menjabat dan memutuskan untuk menjadi cakada pada pilkada mendatang; perilakunya sungguh tak bagai biasanya. Ada seorang Bupati, yang biasanya rajin datang bila ada undangan rapat di kantor gubernur atau di istana Negara; mendadak kini ia lebih suka mendatangi undangan rapat di kantor kecamatan, kelurahan, kantor desa, atau di Balai RW, bahkan mungkin di rumah ketua RT. Mengapa demikian? Karena perhelatan rapat di tingkat akar rumput identik dengan identik dengan penggalangan simpati massa, yang itu sangat menguntungkan bagi keperluan mendulang suara.

Kasus lain, ada wali kota yang kini lebih gemar menjadi pembicara seminar ketimbang melaksanakan 'tugas' dinas ke luar kota, atau ke luar negeri sekalipun. Pasalnya disetiap acara seminar yang digelar, ia memiliki kesempatan untuk membangun simpati publik, terlebih bila seminar tersebut diekspose secara besar-besaran oleh media massa setempat (lihat JP,6/3/2003).

Penggunaan media massa sebagai alat promosi oleh para cakada, tak ada kalah canggihnya dengan desain iklan barang dagangan. Modus ini terutama mampu dilakukan oleh cakada yang sedang *jemeneng noto* menjadi bupati/wali kota sekarang. Ada yang dilakukan dengan menampilkan sejumlah program kerja berikut prestasinya, atau bahkan dengan sengaja di sebuah kolom di sudut Koran, potret, dan senyumannya dipampang, dia datang menyapa warganya. Lalu dengan bahasa sejuk, lembut, dan persuasive; komunikasi politik yang berusaha menyentuh 'medan hati' warganya pun ia tuangkan dalam kata penuh makna (lihat *Kompas Jatim*, 9/3/2005).

Egaliter ala sinterclas, dengan jalan membagi-bagikan apa saja yang bisa dibagi, juga mulai mengemuka. Kasus membagi-bagikan *handphone* (HP) dan kartu pulsa oleh cakada kepada 'komandan peleton' di titik basis suara, yang dilakukan bak membagikan kacang goreng, marak terjadi disekeliling daerah. Manfaatnya ganda, bisa bermakna hadiah (*reward*) bagi yang menerima, sekaligus berfungsi sebagai alat komunikasi yang memperlancar koordinasi, setidaknya koordinasi politik disepanjang pilkada berlangsung.

Bermunculannya sejumlah 'sinterclas' yang datang dengan aneka hadiah dan bawaan, bertujuan menghamba pada nyonya dan tuan, bukan hal aneh yang dihadapi para pemimpin informal (orang berpengaruh yang mampu menggalang massa) di hampir seluruh pelosok desa. Tentu saja itu dilakukan dengan amat rapi, lantaran takut 'semprit polisi' pengawas pilkada berbunyi, dan insiden 'tilang' pun terjadi.

Masih banyak lagi modus egaliter lain yang mengemuka akhir-akhir ini, termasuk segudang janji manis tentang apa yang dilakukan dan diberikan, bila cakada berhasil memenangkan persaingan dalam pilkada nanti .

Tak heran, jika fenomena demikian mengundang lahirnya spekulasi public untuk bertanya: (1) apakah kecenderungan perilaku egaliter para elite politik ini merupakan fenomena natural yang akan berlaku kekal sebagai representasi dari makin tingginya derajat humanisme yang berkembang di negeri ini; ataukah (2) Kecenderungan perubahan perilaku itu hanya merupakan fenomena sesaat yang tendensius dan semu sifatnya terkait kepentingan politik di agenda pilkada. Tulisan ini menempatkan pertanyaan kedua sebagai titik awal dalam membangun hipotesa.

Resep politik

Banyak pihak menyadari bahwa hadirnya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur mekanisme pilkada (pasal 56-119), membawa perubahan mendasar pada alokasi kewenangan dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi kepala daerah.

Semula, kewenangan itu ada ditangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten kota. Tetapi kini, kewenangan itu bergeser ke tangan public pemilih (konstituen) di masing-masing daerah, disamping juga kepala daerah para elite partai politik (parpol), lantaran parpolah yang berhak 'menjaga gawang' cakada. Sebab hanya ada 'satu pintu' yang harus dilewati oleh seseorang bila ia ingin menjadi cakada, adalah pintu parpol. Karena yang berhak mengusulkan pasangan cakada adalah parpol atau gabungan parpol yang mendapatkan suara sah minimal 15% dalam pemilu legislative 5 April 2004 (Sebagaimana diatur pasal 59).

Pergeseran kewenangan ini berimplikasi pada lahirnya otoritas yang dimiliki public (secara personal) untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin daerahnya. Pada tartan ini, para elite politik pun tentu menyadari bahwa afiliasi politik seseorang terhadap cakada terutama ditentukan oleh dua macam pertimbangan, ialah pertimbangan rasional dan pertimbangan emosional.

Pertimbangan pertama mengacu pada penilaian public untuk mengukur kemampuan (kapabilitas) cakada, baik kapabilitas manajerial maupun substansial; sedangkan pertimbangan kedua mengacu pada derajat simpati public terhadap cakada, yang kemudian menjadi penentu atas besarnya tingkat penerimaan (akseptabilitas) public terhadap seorang cakada. Jadi, dua hal, yakni kapabilitas dan akseptabilitas, menjadi kata kunci yang dapat memuluskan jalan dari cakada menuju jabatan kada.

Pada daratan logika inilah diasumsikan egaliter kemudian menjadi pola tindak dan perilaku para elite politik, yang tidak lain bertujuan membangun afiliasi politik dalam jalur rasional dan emosional sekaligus, secara instan. Jika asumsi ini benar, maka sesungguhnya pada kasus pilkada, perilaku egaliter telah ditempatkan sebagai "resep politik" (untuk tidak menyebut alat propaganda) oleh para cakada. Dengan demikian, hampir pasti; egaliter model ini bersifat tendensius, temporer, dan semu; yang diasumsi kan bakal luntur ketika tujuan menjadi kada telah tercapai.

Bagaimana sebaliknya?

Tidak perlu diragukan, jika pemimpin egaliter merupakan pemimpin harapan public. Juga tidak perlu diragukan bila kepemimpinan egaliter disebut lebih berpeluang efektif dalam menciptakan kesejahteraan. Persoalannya, ketika egaliter ini hanya tampil kesejahteraan. Persoalannya, ketika egaliter ini hanya tampil sesaat, tendensius, dan semu. Tepatnya hanya muncul sebagai resep politik guna memenangkan 'pertempuran' dalam pilkada, lalu selesai; maka egaliter macam ini layak disebut sebagai tindakan 'kriminal' yang bermakna pembohongan.

Ke depan, para cakada semestinya lebih baik bersikap bijaksana, dengan tampil elegan, wajar, dan apa adanya di depan public yang menjadi konstituennya. Karena sesungguhnya rakyat banyak sedang menunggu kinerja terbaiknya, bukan kebohongannya, bukan pula egaliter semunya.

Alangkah mulianya jika memang ada cakada yang berparadigma egaliter sejati. Adalah egaliter secara luar-dalam penuh ketulusan, *all out*, dan langgeng. Tentu, cakada jenis ini akan konsisten dalam beregaliter, baik pada saat menjelang maupun setelah pilkada berlangsung. Pimpinan jenis inilah yang dicintai semua kalangan dan dirindukan banyak orang. Adakah cakada dengan kualifikasi demikian?

Apapun adanya, segenap warga kabupaten/kota nampaknya akan dengan cerdas menggunakan hak politiknya dalam pilkada, dengan jalan memilih cakada berkinerja, bukan cakada yang naik 'panggung' pilkada 'bertopeng cantik' dan 'berpusana menarik', namun setelah terpilih... ternyata ia si 'buruk muka' yang siap berbuat semena-mena. (*)